

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks. Sebagai organisasi nirlaba, pemerintah mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa akan datang.

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada kabupaten atau kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang termuat dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah revisi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik yang diberikan kemasyarakat menggunakan dana dari masyarakat, sehingga dilakukan pertanggungjawaban pada masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat secara transparan. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat diperlukan untuk menilai bagaimana kinerja organisasi sektor publik.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah serta pengukuran kinerja Pemerintah Daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Sebuah kinerja pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan.

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Salah satu cara pengukuran kinerja yang dapat dipertimbangkan adalah dengan melakukan pengukuran atau penilaian kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan konsep *value for money*.

Konsep *value for money* bukan sesuatu yang baru, bahkan *value for money* merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dari *good governance*.

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan *good public and corporate governance* (Mardiasmo, 2009). *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama.

Inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peran sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah juga memiliki posisi dan peran yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi suatu program pemerintah daerah. Dari segi fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan, sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan

tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Inspektorat kabupaten Bangka merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Peran dan fungsi inspektorat Kabupaten Bangka tertuang dalam Perbup No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka.

Kinerja dari Inspektorat daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja, maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Penilaian terhadap kinerja pada Inspektorat Kabupaten Bangka lebih ditekankan pada penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui LAKIP hanya bertumpu pada *output* yang diperoleh Inspektorat Kabupaten Bangka dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan *outcome*.

Value for money dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*, selain itu konsep *value for money* dalam pengukurannya terintegrasi mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome*, sehingga perlu untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan konsep *value for money*. Dimana penelitian ini mengukur kinerja pengelolaan keuangan Inspektorat

Kabupaten Bangka tahun 2015-2016. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik dalam Perspektif *Value for Money* pada Inspektorat Kabupaten Bangka”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerapkan pengukuran *value for money* dalam mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka, yang difokuskan pada konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan penelitian yang akan dikaji berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*) kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Bangka tahun 2015-2016 ?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan mengarah pada tujuan dan mempermudah proses pengolahan data, maka perlu ditetapkan batasan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan batasan pengukuran kinerja berdasarkan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka tahun 2015-2016.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain :

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam bidang keuangan khususnya tentang rasio keuangan dimana rasio keuangan ini menjadi tolak ukur kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Bangka. Serta mencoba membandingkan antara teori yang didapat dibangku kuliah dengan kenyataan praktik pemerintah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan sektor publik.

2. Kontribusi Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk membantu aparatur pemerintah dalam meningkatkan kinerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan fungsi organisasi dan tercapainya visi dan misi organisasi serta mendapat gambaran tentang kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Bangka.

3. Kontribusi Kebijakan

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja SKPD Kabupaten Bangka.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang masalah dan uraian-uraian pembahasan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini: sektor publik dan organisasi sektor publik, *good governance*, laporan keuangan sektor publik, pengukuran kinerja, *value for money*, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Bangka membahas visi dan misi, susunan organisasi dan penjabaran tugas, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bangka, *value for money*, analisis data, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan analisis *value for money*.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, serta memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.

